

## Dinamika Hubungan Sipil-Militer dan Opini Publik dalam Pembentukan Keputusan Kebijakan Pertahanan

Aris Sarjito<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

[arissarjito@gmail.com](mailto:arissarjito@gmail.com) \*

---

### Article Info

#### Article History

Received:

5 June 2024

Accepted:

6 June 2024

Published:

8 June 2024

---

#### Kata Kunci

hubungan sipil-militer  
kebijakan pertahanan  
negara demokratis  
opini publik  
pengaruh media

#### Keywords

civil-military relations  
defense policy  
democratic states  
media influence  
public opinion

---

### Abstrak

Di negara-negara demokratis, hubungan sipil-militer dan opini publik secara signifikan mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi mekanisme interaksi para pemimpin sipil dan pejabat militer dalam merumuskan kebijakan pertahanan, dan bagaimana sentimen publik, yang dibentuk oleh media tradisional dan media sosial, berdampak pada keputusan-keputusan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya analisis data sekunder berupa studi kasus dan literatur ilmiah, penelitian ini menyelidiki tiga bidang utama: dampak hubungan sipil-militer terhadap kebijakan pertahanan, peran opini publik dan pengaruh media, dan interaksi antara sipil-militer, hubungan dan opini publik. Temuan-temuan menunjukkan bahwa pernyataan publik dan liputan media para pemimpin militer secara signifikan membentuk opini publik, yang menekan para pemimpin sipil untuk menyesuaikan kebijakan pertahanan. Penarikan AS dari Afghanistan adalah contoh utama menurunnya dukungan publik, yang dipengaruhi oleh gambaran media dan penilaian militer, menyebabkan perubahan kebijakan strategis. Kajian ini menyimpulkan bahwa memahami keterkaitan antara hubungan sipil-militer dan opini publik sangatlah penting bagi pembuatan kebijakan pertahanan yang efektif dan demokratis.

*Abstract. In democratic states, civil-military relations and public opinion significantly influence defense policy decisions. This research explores the mechanisms through which civilian leaders and military officials interact to formulate defense policies, and how public sentiment, shaped by traditional and social media, impacts these decisions. Using qualitative research methods, specifically secondary data analysis of case studies and scholarly literature, this study investigates three key areas: the impact of civil-military relations on defense policy, the role of public opinion and media influence, and the interaction between civil-military relations and public opinion. Findings indicate that military leaders' public statements and media coverage significantly shape public opinion, which pressures civilian leaders to adapt defense policies. The U.S. withdrawal from Afghanistan is a prime example where declining public support, influenced by media portrayals and military assessments, led to a strategic policy shift. This study concludes that understanding the interplay between civil-military relations and public opinion is crucial for effective and democratic defense policy-making.*

## Pendahuluan

Interaksi yang rumit antara hubungan sipil-militer dan opini publik membentuk landasan dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan. Memahami dinamika ini sangat penting untuk memahami bagaimana demokrasi modern berfungsi, khususnya mengenai keamanan dan pertahanan. Penelitian ilmiah terbaru memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi, sangat mempengaruhi kebijakan pertahanan.

Hubungan sipil-militer mengacu pada keseimbangan kekuasaan dan hubungan antara kepemimpinan politik sipil dan pembentukan militer. Prinsip dasar kontrol sipil atas militer adalah ciri khas pemerintahan demokratis, memastikan bahwa pejabat terpilih, bukan pemimpin militer, membuat keputusan kebijakan pertahanan akhir. Menurut teori agensi Peter D. Feaver, para pemimpin sipil mendelegasikan wewenang kepada para pemimpin militer tetapi mempertahankan kekuasaan untuk mengawasi dan campur tangan bila diperlukan (Feaver, 2003).

Studi terbaru menyoroti kompleksitas hubungan ini, terutama pada saat krisis. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak negara menyaksikan peningkatan peran militer dalam kesehatan masyarakat dan logistik, mengaburkan batas antara bidang militer dan sipil (Avant, 2021). Ini memerlukan pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana hubungan sipil-militer beradaptasi dengan keadaan luar biasa tanpa merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Opini publik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pertahanan, berfungsi sebagai mekanisme umpan balik bagi pembuat kebijakan. Akuntabilitas demokratis memastikan bahwa sentimen publik dapat mempengaruhi keputusan politik, terutama dalam masalah perang dan perdamaian. Penelitian oleh Gelpi et al. (2009) menunjukkan bahwa dukungan publik untuk keterlibatan militer sangat penting untuk mempertahankan operasi yang berkepanjangan. Mereka berpendapat bahwa sensitivitas korban dan persepsi keberhasilan adalah penentu utama dukungan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya media sosial telah mengubah lanskap pembentukan opini publik. *Platform* seperti Twitter dan Facebook memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan mobilisasi sentimen publik. Penelitian telah menunjukkan bahwa platform ini dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi publik tentang operasi militer, kadang-kadang mengarah pada perubahan cepat dalam kebijakan (Seethaler & Melischek, 2019).

Interaksi antara hubungan sipil-militer dan opini publik sangat jelas dalam masyarakat demokratis. Para pemimpin sipil harus menavigasi medan kompleks nasihat militer dan sentimen publik untuk membuat keputusan kebijakan pertahanan yang tepat. Salah satu kasus ilustratif adalah keterlibatan AS di Afghanistan. Jajak pendapat publik menunjukkan penurunan dukungan untuk perang selama bertahun-tahun, mempengaruhi para pemimpin politik untuk mencari strategi keluar (Eikenberry, 2013).

Selain itu, hubungan sipil-militer dapat mempengaruhi opini publik. Para pemimpin militer, berdasarkan keahlian dan kepercayaan publik mereka, dapat membentuk persepsi publik melalui pernyataan dan tindakan mereka. Fenomena "dukungan militer" terhadap kebijakan tertentu dapat mempengaruhi opini publik dan, selanjutnya, pengambilan keputusan politik (Brooks, 2016).

Peristiwa geopolitik baru-baru ini memberikan lahan subur untuk memeriksa dinamika ini. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah mengedepankan peran penting hubungan sipil-militer dan opini publik. Di banyak negara NATO, dukungan publik untuk Ukraina telah menjadi faktor penting dalam membentuk kebijakan bantuan pertahanan dan bantuan militer (Mackinnon, 2022). Para pemimpin sipil harus menyeimbangkan penilaian militer terhadap situasi dengan tuntutan publik untuk tindakan melawan agresi Rusia.

Kasus lainnya adalah pergeseran postur pertahanan AS di kawasan Asia-Pasifik. Opini publik mengenai ancaman yang dirasakan dari China dan Korea Utara memengaruhi penyebaran dan aliansi militer AS di kawasan itu. Kebijakan pemerintahan Biden mencerminkan pertimbangan yang cermat terhadap saran militer dan sentimen publik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (Swaine, 2021).

Interaksi antara hubungan sipil-militer dan opini publik merupakan elemen penting namun kompleks dalam perumusan keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis. Hubungan sipil-militer memastikan kontrol sipil atas militer, mempertahankan pemerintahan yang demokratis dan mencegah militerisasi pembuatan kebijakan (Feaver, 2003). Secara bersamaan, opini publik bertindak sebagai mekanisme umpan balik, mempengaruhi keputusan para pemimpin politik tentang keterlibatan militer dan strategi pertahanan (Gelpi et al., 2009). Namun, dinamika ini penuh dengan tantangan, terutama pada saat krisis atau konflik ketika pengambilan keputusan yang cepat adalah yang terpenting. Sifat penyebaran media dan informasi yang berkembang semakin memperumit hubungan ini, sehingga penting untuk memahami bagaimana hubungan sipil-militer kontemporer dan opini publik membentuk keputusan kebijakan pertahanan (Seethaler & Melischek, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hubungan sipil-militer terhadap keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis, dengan fokus pada keseimbangan kekuasaan antara pemimpin sipil dan pejabat militer. Ini akan mengeksplorasi studi kasus historis dan kontemporer untuk menggambarkan pengaruh ini. Studi ini juga akan memeriksa peran opini publik dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan, memeriksa bagaimana sentimen, dimobilisasi melalui media tradisional dan sosial, mempengaruhi kebijakan di berbagai konteks dan konflik. Interaksi antara hubungan sipil-militer dan opini publik akan dieksplorasi, menilai bagaimana mereka secara kolektif membentuk kebijakan pertahanan dan mengevaluasi contoh-contoh di mana faktor-faktor ini selaras atau bertentangan, mempengaruhi hasil kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan sipil-militer dan opini publik mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis. Bab ini menyelidiki mekanisme interaksi antara pemimpin sipil dan pejabat militer dalam membentuk kebijakan pertahanan, tingkat pengaruh militer terhadap keputusan sipil, peran pengawasan sipil, dan dampak krisis terhadap hubungan tersebut. Selain itu, artikel ini mengkaji cara-cara langsung dan tidak langsung opini publik, yang dibentuk oleh media tradisional dan media sosial, dalam mempengaruhi kebijakan pertahanan. Dengan menganalisis studi kasus tertentu, seperti intervensi militer AS, operasi NATO, dan penarikan AS dari Afghanistan, penelitian ini menyoroti bagaimana dinamika sipil-militer dan sentimen publik bersama-sama membentuk keputusan strategis, dengan fokus pada skenario di mana pernyataan publik dan opini publik para pemimpin militer menekan para pemimpin sipil untuk menyesuaikan strategi militer, sehingga menghasilkan hasil kebijakan yang signifikan.

Dinamika hubungan sipil-militer dan opini publik sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis. Memahami interaksi yang kompleks ini sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan demokratis dalam masalah pertahanan. Tujuan dan pertanyaan penelitian yang diusulkan bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang dinamika ini, menyumbangkan wawasan berharga ke bidang ilmu politik dan studi pertahanan. Dengan memeriksa studi kasus terbaru dan historis, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana negara-negara demokratis menavigasi keseimbangan yang rumit antara pengaruh militer dan sentimen publik dalam merumuskan kebijakan pertahanan.

### **Tinjauan Pustaka**

Teori *Principal-Agent* berperan penting dalam menganalisis bagaimana hubungan sipil-militer berdampak pada keputusan kebijakan pertahanan. Menurut teori ini, pemimpin sipil (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada pejabat militer (agen) tetapi mempertahankan kontrol tertinggi melalui mekanisme pengawasan (Feaver, 2003). Kerangka kerja ini membantu menjelaskan keseimbangan kekuasaan dan potensi ketegangan yang muncul ketika keahlian militer bertentangan dengan preferensi kebijakan sipil. Selain itu, *Huntington's Theory of Objective Civilian Control* berpendapat untuk pembagian yang jelas antara bidang militer dan sipil untuk memastikan pembuatan kebijakan pertahanan yang efektif sambil mencegah pengaruh militer yang tidak semestinya (Huntington, 1995). Teori ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan otonomi profesional untuk militer sambil memastikan supremasi sipil.

Teori *Agenda-Setting* sangat penting untuk memahami bagaimana opini publik membentuk kebijakan pertahanan dan dipengaruhi oleh media. Teori ini berpendapat bahwa outlet media tidak memberi tahu orang apa yang harus dipikirkan, melainkan apa yang harus dipikirkan,

dengan menyoroiti isu-isu spesifik dan membingkainya dengan cara tertentu (McCombs & Shaw, 1972). *Framing Theory* lebih lanjut menguraikan bagaimana penyajian informasi mempengaruhi persepsi dan opini publik (Entman, 2004). Misalnya, liputan media tentang konflik militer, menyoroiti korban atau keberhasilan strategis, dapat secara signifikan mengubah dukungan publik untuk kebijakan pertahanan. Teori Opini Publik, seperti yang dibahas oleh para sarjana seperti Zaller (1992), meneliti bagaimana opini individu dibentuk dan dipengaruhi oleh wacana elit dan narasi media, menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana pergeseran sentimen publik berdampak pada keputusan kebijakan.

Teori Permainan Dua Tingkat oleh Putnam (2017) menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis interaksi antara hubungan sipil-militer dan opini publik dalam keputusan kebijakan pertahanan. Teori ini menunjukkan bahwa para pemimpin politik harus secara bersamaan bernegosiasi dengan konstituen domestik dan aktor internasional, menyeimbangkan opini publik internal dan dinamika sipil-militer untuk merumuskan kebijakan yang koheren. Selain itu, *Punctuated Equilibrium Theory*, seperti yang diterapkan oleh Baumgartner & Jones (2010), menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan yang signifikan terjadi ketika pergeseran opini publik dan hubungan sipil-militer menciptakan jendela peluang untuk perubahan kebijakan besar. Teori ini membantu kita memahami bagaimana perubahan mendadak, seperti penarikan AS dari Afghanistan, dapat dihasilkan dari interaksi kekuatan-kekuatan ini.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif, terutama yang menggunakan data sekunder, menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menyelidiki fenomena kompleks seperti dinamika hubungan sipil-militer dan opini publik dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan. John W. Creswell, seorang sarjana terkemuka dalam penelitian kualitatif, menguraikan berbagai pendekatan dan metodologi yang memberikan wawasan komprehensif ke dalam proses sosial dan politik (Creswell & Poth, 2016). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana metode kualitatif menggunakan data sekunder dapat digunakan secara efektif untuk mempelajari interaksi antara hubungan sipil-militer dan opini publik dalam konteks kebijakan pertahanan.

Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman perilaku manusia, persepsi, dan interaksi dalam konteks alami mereka. Creswell menekankan bahwa penelitian kualitatif bersifat eksploratif dan berusaha memberikan wawasan mendalam daripada prediksi umum. Ini melibatkan metode seperti studi kasus, analisis konten, dan analisis tematik, yang sangat cocok untuk memeriksa data historis dan kontemporer yang terkait dengan hubungan sipil-militer dan opini publik (Creswell & Poth, 2016).

Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dan tersedia untuk analisis. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan pemerintah,

dokumen sejarah, konten media, survei opini publik, dan studi akademis. Memanfaatkan data sekunder dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dataset yang luas tanpa kendala waktu dan sumber daya pengumpulan data primer (Bryman, 2016).

### **Aplikasi untuk Hubungan Sipil-Militer dan Opini Publik**

Studi kasus memberikan wawasan mendalam tentang hubungan sipil-militer dan opini publik, memungkinkan para peneliti untuk memeriksa bagaimana opini publik mempengaruhi kebijakan pertahanan dan interaksi para pemimpin militer dengan otoritas sipil. Analisis konten, yang melibatkan analisis sistematis teks seperti pidato, artikel berita, dan posting media sosial, membantu melacak evolusi sentimen publik dan dampaknya terhadap keputusan kebijakan. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang intervensi militer, dan analisis konten membantu mengeksplorasi bagaimana saluran komunikasi memengaruhi persepsi publik dan hasil kebijakan. Analisis tematik, di sisi lain, mengidentifikasi dan menganalisis tema yang berulang dalam data kualitatif, seperti kepercayaan, legitimasi, dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Metode ini membantu peneliti mengembangkan pemahaman yang bernuansa fenomena sosial yang kompleks (Eikenberry, 2013; Gelpi et al., 2009).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dampak Hubungan Sipil-Militer terhadap Keputusan Kebijakan Pertahanan di Negara-negara Demokratis**

Hubungan sipil-militer di negara-negara demokratis secara signifikan mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan, yang melibatkan prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada agen dan warga sipil dan mempertahankan kontrol melalui mekanisme pengawasan. Ini menyeimbangkan otonomi dengan penyesuaian kebijakan, menyoroti potensi ketegangan antara preferensi sipil dan militer dan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang kuat (Feaver, 2003; Ricks, 2007).

Huntington's Theory of Objective Civilian Control menekankan perlunya pemisahan yang jelas antara bidang sipil dan militer dalam pembuatan kebijakan pertahanan untuk mencegah militerisasi dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Ini menekankan supremasi sipil dalam kebijakan pertahanan untuk mencegah pengaruh militer atas keputusan politik, seperti yang terlihat selama Perang Dingin. Pendekatan seimbang ini mempertahankan kontrol demokratis atas kekuatan militer, mencegah monopoli (Rosen, 1991).

Hubungan sipil-militer adalah aspek fundamental dari pemerintahan yang demokratis, memastikan bahwa militer beroperasi di bawah kendali sipil sambil berkontribusi pada perumusan dan implementasi kebijakan pertahanan. Interaksi dinamis antara pemimpin sipil dan pejabat militer secara signifikan mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan (Harig

et al., 2022). Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme di mana interaksi ini terjadi, memeriksa sejauh mana pengaruh militer terhadap keputusan sipil, peran pengawasan sipil, dan dampak krisis pada hubungan ini. Dengan menganalisis studi kasus tertentu, seperti intervensi militer AS dan operasi NATO, kita dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hubungan sipil-militer membentuk keputusan strategis.

### **Mekanisme interaksi**

Hubungan antara para pemimpin sipil dan pejabat militer disusun untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan bahwa militer melayani negara demokratis daripada mendominasinya. Menurut teori hubungan sipil-militer Peter D. Feaver, interaksi ini sering ditandai dengan kerangka prinsipal-agen, di mana para pemimpin sipil (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada pejabat militer (agen) tetapi mempertahankan pengawasan dan kontrol tertinggi (Feaver, 2003). Model ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan sipil, seperti pemeriksaan legislatif, proses pengambilan keputusan yang transparan, dan struktur akuntabilitas.

Para pemimpin sipil mengandalkan keahlian militer untuk menginformasikan keputusan mereka, terutama di bidang kebijakan pertahanan yang kompleks dan teknis. Pejabat militer memberikan penilaian, rencana operasional, dan rekomendasi strategis berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. Namun, otoritas pengambilan keputusan akhir terletak pada para pemimpin sipil, yang harus mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas dalam keputusan mereka (Brooks, 2016).

### **Tingkat Pengaruh Militer**

Pengaruh militer terhadap keputusan sipil bervariasi di berbagai negara demokratis dan seringkali bergantung pada konteks politik dan masalah spesifik yang dihadapi. Dalam beberapa kasus, pejabat militer dapat memberikan pengaruh yang cukup besar karena keahlian mereka dan urgensi situasi. Misalnya, selama masa perang atau krisis, penilaian dan rekomendasi para pemimpin militer dapat sangat membentuk keputusan kebijakan. Keterlibatan AS di Irak dan Afghanistan menggambarkan bagaimana saran militer dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan strategis, mulai dari pengerahan pasukan hingga taktik kontra-pemberontakan (Eikenberry, 2013).

Namun, pengawasan sipil tetap menjadi penyeimbang penting untuk mencegah pengaruh militer yang tidak semestinya. Lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen dan komite pengawas, memainkan peran penting dalam meneliti proposal militer dan memastikan bahwa kebijakan pertahanan selaras dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, Kongres A.S. melakukan pengawasan signifikan atas kebijakan pertahanan melalui kekuatan dompet, dengar pendapat, dan investigasinya (Avant, 2021).

Peran Pengawasan Sipil

Pengawasan sipil sangat penting untuk mempertahankan kontrol demokratis atas militer dan memastikan bahwa kebijakan pertahanan mencerminkan kehendak rakyat. Mekanisme pengawasan yang efektif mencakup pengawasan legislatif, proses pengambilan keputusan yang transparan, dan sistem akuntabilitas yang meminta pertanggungjawaban pejabat militer atas tindakan mereka (Lagassé & Saideman, 2019). Mekanisme ini membantu mencegah militerisasi pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa strategi pertahanan tunduk pada debat dan persetujuan demokratis.

Dalam operasi NATO, pengawasan sipil dilembagakan melalui struktur seperti North Atlantic Council, di mana perwakilan sipil negara-negara anggota mengawasi strategi dan keputusan militer. Ini menjamin bahwa kemauan politik kolektif daripada pertimbangan militer murni berfungsi sebagai dasar bagi kebijakan pertahanan NATO (Sperling & Webber, 2017).

### **Dampak Krisis pada Hubungan Sipil-Militer**

Krisis, seperti perang, serangan teroris, dan pandemi, dapat mengganggu hubungan sipil-militer dan mengubah keseimbangan kekuasaan yang biasa. Selama krisis, urgensi dan kompleksitas pengambilan keputusan sering meningkatkan peran pejabat militer, yang memiliki keahlian dan kapasitas operasional untuk merespons secara efektif (Acácio & Passos, 2024). Namun, peningkatan peran militer ini harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah erosi kontrol sipil dan norma-norma demokrasi.

Pandemi COVID-19, misalnya, membuat militer di banyak negara demokratis mengambil peran penting dalam logistik, kesehatan masyarakat, dan tanggap darurat. Sementara ini meningkatkan efisiensi manajemen krisis, itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang implikasi jangka panjang untuk hubungan sipil-militer dan potensi militerisasi fungsi sipil yang merayap (Avant, 2021).

### **Studi Kasus**

**Intervensi Militer AS:** Intervensi militer AS di Irak dan Afghanistan memberikan contoh ilustratif tentang bagaimana hubungan sipil-militer berdampak pada keputusan kebijakan pertahanan. Para pemimpin militer memainkan peran penting dalam membentuk strategi dan rencana operasional dalam kedua kasus tersebut. Namun, para pemimpin sipil, termasuk Presiden dan Kongres, mempertahankan otoritas pengambilan keputusan tertinggi, menyeimbangkan saran militer dengan pertimbangan politik dan strategis. Perdebatan mengenai lonjakan pasukan, jadwal penarikan, dan strategi kontra-pemberontakan menyoroti interaksi yang kompleks antara rekomendasi militer dan pengawasan sipil (Eikenberry, 2013).

Operasi NATO, seperti di Balkan dan Afghanistan, menunjukkan bagaimana aliansi militer multinasional mengelola hubungan sipil-militer. Struktur pengawasan sipil NATO, termasuk *North Atlantic Council* dan *Military Committee*, memastikan bahwa strategi

militer tunduk pada bimbingan politik dan persetujuan dari negara-negara anggota. Proses pengambilan keputusan kolektif ini mencontohkan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan dalam kebijakan pertahanan multilateral (Sperling & Webber, 2017).

## **2. Peran Opini Publik Dalam Membentuk Keputusan Kebijakan Pertahanan Dan Pengaruh Media**

Di negara-negara demokratis, liputan dan pbingkaian media memiliki dampak signifikan terhadap opini publik, yang merupakan kekuatan dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan. Tiga teori utama — Teori *Agenda-Setting*, Teori *Framing*, dan Teori Opini Publik — menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang proses ini.

Teori agenda-setting menunjukkan media mempengaruhi opini publik dengan menyoroti isu-isu tertentu, seperti konflik atau tindakan militer. Teori Pbingkaian menjelaskan bagaimana penyajian informasi memengaruhi persepsi dan opini publik, seperti dalam pbingkaian media Perang Irak, yang mengarah pada peningkatan ketidaksetujuan dan tuntutan perubahan kebijakan. Teori opini publik, khususnya model Zaller, meneliti bagaimana narasi media dan wacana elit membentuk opini individu, seperti liputan media Perang Vietnam tentang kebrutalan dan kesia-siaan perang (Entman, 2004).

Opini publik memainkan peran penting dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis. Hubungan antara sentimen publik dan kebijakan pertahanan dimediasi melalui berbagai saluran, terutama media (Golby et al., 2018). Diskusi ini mengeksplorasi bagaimana opini publik terbentuk, pengaruh media tradisional dan sosial, dan cara-cara langsung dan tidak langsung di mana persepsi ini berdampak pada pembuat kebijakan. Dengan memeriksa studi kasus, seperti penarikan AS dari Afghanistan, kita dapat memahami perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan yang didorong oleh opini publik.

### **Pembentukan opini publik**

Keyakinan pribadi, nilai-nilai sosial, konteks historis, dan representasi media hanyalah beberapa faktor yang mempengaruhi opini publik tentang kebijakan pertahanan. Media memainkan peran penting dalam membingkai masalah, menetapkan agenda, dan mempengaruhi persepsi publik. Media tradisional, seperti surat kabar, televisi, dan radio, secara historis menjadi sumber informasi utama bagi publik. Outlet-outlet ini menyediakan liputan berita, editorial, dan analisis yang membantu membentuk pemahaman dan opini publik tentang masalah pertahanan (Boynton & Richardson Jr, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah muncul sebagai platform yang kuat untuk penyebaran informasi dan wacana publik. Platform seperti Twitter, Facebook, dan YouTube memungkinkan berbagi berita, opini, dan pembaruan *real-time* dengan cepat, yang secara signifikan memengaruhi cara orang memandang masalah pertahanan. Media sosial tidak

hanya memperkuat suara dan sudut pandang tetapi juga memfasilitasi pembentukan opini publik melalui diskusi interaktif dan komunikasi jaringan (Loader & Mercea, 2012).

## **Pengaruh Media Tradisional dan Sosial**

### **Media Tradisional**

Media tradisional telah lama berpengaruh dalam membentuk opini publik dengan membingkai isu-isu pertahanan dengan cara-cara tertentu. Misalnya, liputan media tentang operasi militer sering menyoroti aspek-aspek tertentu, seperti tujuan strategis, dampak kemanusiaan, dan korban (De Graaf et al., 2015a). Pembingkaiannya ini dapat membentuk persepsi dan sikap publik terhadap keterlibatan militer.

Peran media dalam Perang Vietnam adalah contoh klasik tentang bagaimana liputan dapat mempengaruhi opini publik. Gambar grafis dan laporan dari medan perang membawa realitas perang ke ruang tamu Amerika, yang menyebabkan kekecewaan publik yang meluas dan meningkatnya tekanan pada pembuat kebijakan untuk mundur (Hallin, 1989). Demikian pula, selama Perang Irak, liputan media yang luas tentang konflik dan akibatnya mempengaruhi opini publik dan berkontribusi pada meningkatnya oposisi dari waktu ke waktu (Aday et al., 2005).

### **Media Sosial**

Media sosial telah mengubah lanskap pembentukan opini publik dengan menyediakan platform untuk komunikasi langsung dan luas (Sarjito, 2023). Ini memungkinkan bentuk pertukaran informasi yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif, di mana pengguna dapat berbagi berita, mengungkapkan pendapat, dan terlibat dalam diskusi.

Peran media sosial dalam membentuk opini publik tentang kebijakan pertahanan terbukti dalam konteks Arab Spring. *Platform* media sosial digunakan untuk mengorganisir protes, berbagi informasi, dan memobilisasi sentimen publik terhadap rezim otoriter. Keterlibatan publik ini secara signifikan mempengaruhi persepsi internasional dan tanggapan kebijakan (Howard & Hussain, 2013).

Dalam konteks kebijakan pertahanan AS, media sosial telah berperan penting dalam membentuk opini publik tentang intervensi dan penarikan militer. Penyebaran informasi dan kisah-kisah pribadi yang cepat terkait dengan keterlibatan militer dapat menghasilkan dukungan publik atau oposisi, mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan.

## **Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung terhadap Pembuat Kebijakan**

Opini publik mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi ketika pembuat kebijakan menanggapi sentimen publik untuk mempertahankan dukungan dan legitimasi politik (Campbell & Rigby, 2019). Di negara-negara demokratis, pejabat terpilih sensitif terhadap opini publik, terutama selama

siklus pemilihan. Pengaruh tidak langsung melibatkan pembentukan konteks politik dan sosial yang lebih luas di mana pembuat kebijakan beroperasi.

Penarikan AS dari Afghanistan adalah contoh penting tentang bagaimana opini publik dapat mendorong perubahan kebijakan yang signifikan. Lebih dari dua dekade, dukungan publik untuk perang berkurang karena konflik berkepanjangan, biaya tinggi, dan kurangnya kemajuan yang dirasakan. Liputan media yang menyoroti isu-isu ini semakin mengikis dukungan publik. Pada tahun 2021, data jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika lebih menyukai penarikan, memaksa pemerintahan Biden untuk mempercepat proses tersebut (De Graaf et al., 2015b; Eikenberry, 2013).

### **Studi Kasus**

**Penarikan AS dari Afghanistan:** Keterlibatan AS yang berkepanjangan di Afghanistan menghadapi penurunan dukungan publik dari waktu ke waktu. Liputan media tentang konflik, termasuk laporan tentang korban, biaya keuangan, dan kegagalan untuk mencapai perdamaian abadi, mempengaruhi opini publik. Pergeseran sentimen ini memberi tekanan pada pemerintahan berturut-turut untuk mempertimbangkan kembali kehadiran AS di Afghanistan. Sentimen publik telah bergeser secara tegas terhadap keterlibatan militer yang berkelanjutan, yang berdampak signifikan pada keputusan pemerintahan Biden untuk mundur (Eikenberry, 2013).

*Arab Spring:* Selama *Arab Spring*, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi protes di Timur Tengah dan Afrika Utara. Meluasnya berbagi informasi dan pembaruan *real-time* di platform media sosial membangkitkan sentimen publik terhadap rezim otoriter. Tekanan publik ini memengaruhi respons kebijakan internasional, termasuk strategi pertahanan dan diplomatik (Howard & Hussain, 2013).

### **3. Interaksi Hubungan Sipil-Militer dan Opini Publik untuk Mempengaruhi Keputusan Kebijakan Pertahanan**

*Two-Level Game Theory* dan *Punctuated Equilibrium Theory* adalah teori kunci untuk memahami interaksi kompleks antara hubungan sipil-militer dan opini publik dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis. Teori Putnam menekankan negosiasi ganda para pemimpin dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional untuk kebijakan pertahanan yang koheren (Putnam, 2017).

Interaksi yang rumit antara hubungan sipil-militer dan opini publik memainkan peran penting dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis. Interaksi ini rumit karena melibatkan para pemimpin militer, pembuat kebijakan sipil, dan masyarakat umum, yang semuanya berdampak dan saling mempengaruhi satu sama lain (Huntington, 1995). Diskusi ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini bersinggungan

untuk membentuk kebijakan pertahanan, memeriksa skenario di mana pernyataan publik para pemimpin militer mempengaruhi opini publik, dan contoh-contoh di mana sentimen publik menekan para pemimpin sipil untuk menyesuaikan strategi militer. Dengan menganalisis studi kasus tertentu, kita dapat memahami bagaimana keselarasan atau konflik antara elemen-elemen ini secara signifikan mempengaruhi hasil kebijakan.

### **Persimpangan Hubungan Sipil-Militer dan Opini Publik**

Hubungan sipil-militer mengacu pada hubungan institusional dan pribadi antara pemimpin militer dan otoritas sipil. Di negara-negara demokratis, hubungan ini dirancang untuk memastikan bahwa militer beroperasi di bawah kendali sipil, menjaga keseimbangan yang mencegah militerisasi keputusan kebijakan. Opini publik, di sisi lain, mewakili sikap dan keyakinan kolektif rakyat mengenai berbagai masalah, termasuk kebijakan pertahanan.

Interaksi antara kedua kekuatan ini dapat menciptakan loop umpan balik yang dinamis. Pernyataan dan tindakan publik para pemimpin militer dapat membentuk opini publik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembuat kebijakan sipil. Sebaliknya, sentimen publik yang kuat dapat memaksa para pemimpin sipil untuk mengarahkan strategi militer dengan cara yang selaras dengan preferensi pemilih (Brooks, 2016).

### **Pengaruh Pemimpin Militer terhadap Opini Publik**

Para pemimpin militer, karena keahlian dan otoritas mereka, sering memiliki pengaruh signifikan terhadap opini publik. Pernyataan mereka, baik dalam kesaksian kongres, konferensi pers, atau pidato publik, dapat mempengaruhi sentimen publik. Misalnya, selama Perang Irak, pernyataan publik oleh pejabat militer AS tentang kemajuan dan tantangan konflik memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan debat publik. Ketika para pemimpin militer menyatakan optimisme, dukungan publik cenderung meningkat; Sebaliknya, ketika mereka menyoroti kesulitan, skeptisisme publik tumbuh (Gelpi et al., 2009).

Contoh terbaru adalah penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Pernyataan publik oleh para pemimpin militer, termasuk penilaian mereka terhadap situasi di lapangan dan kelayakan keterlibatan yang berkelanjutan, secara signifikan mempengaruhi opini publik. Ketika para pemimpin militer menyoroti tantangan dan prospek keberhasilan yang terbatas, dukungan publik untuk penarikan meningkat, menekan para pemimpin sipil untuk mempercepat strategi keluar (Eikenberry, 2013).

### **Sentimen Publik Menekan Pemimpin Sipil**

Opini publik dapat memberikan tekanan yang cukup besar pada para pemimpin sipil untuk menyesuaikan strategi militer. Di negara-negara demokratis, pejabat terpilih sangat sensitif terhadap sentimen publik, karena secara langsung berdampak pada legitimasi politik mereka dan prospek untuk pemilihan kembali. Ketika opini publik sangat mendukung atau

menentang tindakan militer tertentu, para pemimpin sipil cenderung menyesuaikan kebijakan mereka.

Perang Vietnam adalah kasus klasik di mana sentimen publik menyebabkan perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanan AS. Para pemimpin sipil berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengakhiri perang ketika oposisi publik tumbuh sebagai tanggapan atas liputan media dan meningkatnya korban. Kebutuhan untuk mengatasi ketidakpuasan publik memiliki dampak signifikan pada keputusan akhir untuk mengakhiri keterlibatan AS di Vietnam (Hallin, 1989).

Demikian pula, oposisi publik yang semakin meningkat terhadap keterlibatan AS yang berkepanjangan di Irak dan Afghanistan menyebabkan perubahan kebijakan yang signifikan. Dalam kedua konflik, kombinasi liputan media, protes publik, dan pergeseran opini publik menciptakan lingkungan di mana para pemimpin sipil harus mempertimbangkan kembali dan akhirnya mengubah strategi militer mereka (Aday et al., 2005).

### **Kasus Keberpihakan dan Konflik**

Penyelarasan atau konflik antara hubungan sipil-militer dan opini publik dapat berdampak signifikan terhadap hasil kebijakan pertahanan. Ketika elemen-elemen ini selaras, keputusan kebijakan cenderung lebih koheren dan efektif. Misalnya, selama tahap awal Perang Irak, dukungan publik dan penilaian militer relatif selaras, yang mengarah pada implementasi kebijakan yang kuat. Namun, ketika perang berlangsung dan tantangan meningkat, opini publik menyimpang dari penilaian militer, yang mengarah ke konflik kebijakan dan akhirnya perubahan strategi (Ricks, 2007).

Konflik antara hubungan sipil-militer dan opini publik dapat menciptakan kemacetan kebijakan atau menyebabkan keputusan yang kurang optimal. Keterlibatan AS di Somalia pada awal 1990-an adalah contoh di mana opini publik dengan cepat berbalik melawan misi setelah insiden "*Black Hawk Down*". Terlepas dari argumen para pemimpin militer untuk melanjutkan keterlibatan, penurunan tajam dalam dukungan publik memaksa penarikan cepat, menyoroti potensi konflik antara penilaian militer dan sentimen publik (Bowden, 2010).

### **Simpulan**

Hubungan sipil-militer secara signifikan mempengaruhi keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis melalui interaksi yang kompleks antara pengaruh militer, pengawasan sipil, dan manajemen krisis. Kerangka kerja prinsipal-agen menyediakan lensa yang berguna untuk memahami dinamika ini, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan untuk memastikan kontrol demokratis atas militer. Pengawasan sipil yang efektif dan proses pengambilan keputusan yang transparan sangat penting untuk menjaga pemerintahan yang demokratis dan mencegah militerisasi pembuatan kebijakan.

Dengan memeriksa studi kasus intervensi militer AS dan operasi NATO, kami memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana dinamika sipil-militer membentuk keputusan strategis, menyoroti peran penting kontrol sipil dalam kebijakan pertahanan demokratis.

Di negara-negara demokratis, media tradisional dan sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini publik, yang sangat penting untuk menentukan kebijakan pertahanan. Liputan media membingkai masalah dan menetapkan agenda, mempengaruhi bagaimana publik memandang masalah pertahanan. Media sosial memperkuat pengaruh ini dengan memungkinkan komunikasi yang cepat dan interaktif. Pembuat kebijakan, pada gilirannya, menanggapi sentimen publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menyesuaikan kebijakan pertahanan agar selaras dengan preferensi publik. Studi kasus, seperti penarikan AS dari Afghanistan dan Musim Semi Arab, menunjukkan dampak kuat opini publik terhadap kebijakan pertahanan, menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika ini dalam pemerintahan kontemporer.

Interaksi antara hubungan sipil-militer dan opini publik merupakan faktor penting dalam membentuk keputusan kebijakan pertahanan di negara-negara demokratis. Pernyataan publik para pemimpin militer dapat secara signifikan mempengaruhi opini publik, yang pada gilirannya menekan para pemimpin sipil untuk menyesuaikan strategi militer. Interaksi dinamis ini memastikan bahwa kebijakan pertahanan tidak hanya diinformasikan oleh keahlian militer tetapi juga mencerminkan sentimen publik. Studi kasus, seperti penarikan AS dari Afghanistan dan konflik historis seperti Perang Vietnam, menggambarkan bagaimana penyesuaian atau konflik antara elemen-elemen ini dapat secara signifikan mempengaruhi hasil kebijakan. Memahami interaksi ini sangat penting untuk mempertahankan kontrol demokratis atas keputusan militer dan memastikan bahwa kebijakan pertahanan selaras dengan nilai-nilai dan preferensi rakyat.

## Daftar Pustaka

- Acácio, I., & Passos, A. M. (2024). Military responses to natural disasters and pandemics. In *Research Handbook on Civil–Military Relations* (pp. 231–245). Edward Elgar Publishing.
- Aday, S., Livingston, S., & Hebert, M. (2005). Embedding the truth: A cross-cultural analysis of objectivity and television coverage of the Iraq war. *Harvard International Journal of Press/Politics*, 10(1), 3–21.
- Avant, D. (2021). The Military and the Pandemic: Civil-Military Relations in COVID-19 Response. *Journal of Strategic Studies*.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (2010). *Agendas and instability in American politics*. University of Chicago Press.
- Bowden, M. (2010). *Black Hawk down: A story of modern war*. Grove/Atlantic, Inc.

- Boynton, G. R., & Richardson Jr, G. W. (2016). Agenda setting in the twenty-first century. *New Media & Society*, 18(9), 1916–1934.
- Brooks, R. (2016). *How everything became war and the military became everything: Tales from the Pentagon*. Simon and Schuster.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford university press.
- Campbell, A. L., & Rigby, E. (2019). Public opinion and public policy. In *New directions in public opinion* (pp. 338–362). Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- De Graaf, B., Dimitriu, G., & Ringsmose, J. (2015a). *Strategic narratives, public opinion and war: Winning domestic support for the Afghan War*. Routledge.
- De Graaf, B., Dimitriu, G., & Ringsmose, J. (2015b). *Strategic narratives, public opinion and war: Winning domestic support for the Afghan War*. Routledge.
- Eikenberry, K. W. (2013). The limits of counterinsurgency doctrine in Afghanistan: The other side of the COIN. *Foreign Aff.*, 92, 59.
- Entman, R. M. (2004). *Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy*. University of Chicago Press.
- Feaver, P. D. (2003). *Armed servants: Agency, oversight, and civil-military relations*. Harvard University Press.
- Gelpi, C., Feaver, P. D., & Reifler, J. (2009). *Paying the human costs of war: American public opinion and casualties in military conflicts*. Princeton University Press.
- Golby, J., Feaver, P., & Dropp, K. (2018). Elite military cues and public opinion about the use of military force. *Armed Forces & Society*, 44(1), 44–71.
- Hallin, D. C. (1989). *The uncensored war: The media and Vietnam*. Univ of California Press.
- Harig, C., Jenne, N., & Ruffa, C. (2022). Operational experiences, military role conceptions, and their influence on civil-military relations. *European Journal of International Security*, 7(1), 1–17.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's fourth wave?: digital media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Huntington, S. P. (1995). Armed Forces and Democracy: Reforming Civil-Military Relations. *Journal of Democracy*, 6(4), 9–17.
- Lagassé, P., & Saideman, S. M. (2019). When civilian control is civil: Parliamentary oversight of the military in Belgium and New Zealand. *European Journal of International Security*, 4(1), 20–40.
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2012). Networking Democracy?: Social Media Innovations in Participatory Politics. In *Social media and democracy* (pp. 1–10). Routledge.
- Mackinnon, A. (2022). *NATO's Response to the Ukraine Crisis: A Public Opinion Analysis*. Foreign Policy.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.

- Putnam, R. D. (2017). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. In *International organization* (pp. 437–470). Routledge.
- Ricks, T. E. (2007). *Fiasco: the American military adventure in Iraq*. Penguin UK.
- Rosen, S. P. (1991). *Winning the next war: Innovation and the modern military*. Cornell University Press.
- Sarjito, A. (2023). The Influence of Social Media on Public Administration. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 106–117.
- Seethaler, J., & Melischek, G. (2019). The Role of Social Media in Shaping Public Opinion on Military Interventions. *International Journal of Communication*.
- Sperling, J., & Webber, M. (2017). NATO and the Ukraine crisis: Collective securitisation. *European Journal of International Security*, 2(1), 19–46.
- Swaine, M. D. (2021). *The U.S.-China Military Balance in the Asia-Pacific Region*. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- Zaller, J. (1992). *The nature and origins of mass opinion*. Cambridge university press.